

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 85

TAHUN

Krisis Energi = Krisis Ideologi

Akibat kebijakan energi primer yang tidak pro-rakyat, Indonesia mengalami krisis energi. Pengelolaan listrik sebaiknya tetap dipegang oleh pemerintah dengan target benefit oriented.

Krisis listrik yang terjadi beberapa tahun terakhir ini mengundang keprihatinan mendalam dari Ahmad Daryoko. Bahkan keprihatinan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara Strategis (BUMNS) itu juga menyangkut hal yang lebih luas. Yakni menyangkut krisis energi secara keseluruhan. "Kita ini katanya kaya sumber daya alam, kaya akan barang-barang mineral yang menjadi sumber utama energi, nyatanya kita malah kesulitan," katanya.

Dalam analisis Ahmad Daryoko, sumber utama krisis yang melanda negeri ini berpangkal pada masalah ideologi. Menurut dia, pada saat ini, pengelola negeri ini tidak memiliki ideologi sebagaimana dicitakan *founding father*. Yakni Pancasila. Pengelola negara pada saat ini lebih condong ke kapitalis. "Pada hakikatnya, modal asing tidak harus ditolak. Modal asing menjadi masalah manakala keberadaannya mengancam kedaulatan negeri ini," ujarnya.

Contoh paling nyata bahwa kapitalisme tengah berupaya menghancurkan sendi-sendi per-

ekonomian bangsa ada pada pengelolaan listrik. Yakni munculnya ide privatisasi Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan, yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada Desember 2004. Di sana, kegiatan kelistrikan dibagi menjadi beberapa unit: pembangkit, transmisi, distribusi, dan retail. Tiap-tiap unit dikelola oleh badan usaha, termasuk swasta dan asing, yang berbeda-beda.

Model pasar bebas kelistrikan yang disebut *unbundling* itu, jika diterapkan, dipastikan akan membawa dampak negatif. Pengelolaan oleh perusahaan secara terpisah (dan dibolehkan oleh swasta), atas kegiatan pembangkit, transmisi, distribusi, dan retail akan mendorong adanya *multi-transfer pricing*, dan tiap-tiap segmen akan mengejar keuntungan sendiri-sendiri. Model seperti ini akan menimbulkan kenaikan tarif listrik berlipat. Bahkan bisa mencapai 20 kali lipat.

Hal ini, misalnya, terjadi di Kamerun.

Contohnya terjadi di Inggris pada masa Perdana Menteri (PM) Margaret Thatcher. Namun model *unbundling* di Inggris itu diubah dan dikembalikan

ke *vertically integrated system* pada masa PM Tony Blair. Pemerintah Malaysia di zaman Mahathir Mohamad pernah pula didesak IMF untuk meng-*unbundling*-kan sistem kelistrikannya. Namun dengan tegas Mahathir mengusir IMF, sehingga sistem kelistrikannya masih seperti Indonesia, yaitu *bundling system*.

Belajar dari pengalaman tersebut, dan terlebih mengingat UUD 1945, sistem kelistrikan di Indonesia sebaiknya tetap dikelola oleh pemerintah dengan target *benefit oriented*. Yakni untuk keuntungan sebesar-besarnya bagi masyarakat, sebagaimana halnya pemerintah menyediakan jalan raya dan infrastruktur yang lain. Pengelolaan listrik harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetap menarik dan mengundang investor, mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendorong fasilitas umum.

Bagaimana caranya? Ahmad Daryoko mengusulkan agar pimpinan bangsa ini berani membuat kebijakan energi yang menguntungkan rakyat. Antara lain menerapkan kebijakan energi primer (minyak, gas, dan batu bara) yang prodalim negeri/rakyat. Artinya, energi primer hasil bumi Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan energi di dalam negeri. "Tidak seperti sekarang, hasil bumi, minyak, gas, dan batu bara semuanya dijual ke luar negeri," katanya.

Dampak kebijakan energi yang tidak pro-rakyat pun terasa pada saat ini: listrik byar-pet lantaran kelangkaan minyak, gas, dan batu bara, yang semuanya dijual ke luar negeri. Pemerintah sedang mengalami krisis ideologi yang berakibat krisis kepemimpinan. Untuk waktu yang akan datang, kita menginginkan seorang pemimpin yang berkarakter dan visioner, yang ditunjukkan dengan sikap, antara lain, berani menasionalisasi aset-aset strategis yang dikuasai asing, berani menunda pembayaran utang luar negeri, dan berani mengembangkan potensi nuklir sebagaimana Iran, Pakistan, India, dan Korea Utara. ●

TRESNA NURANI

Ahmad Daryoko, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja PLN



**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 25

TAHUN 2001

Berbagi Beban Krisis Listrik

Memindahkan hari kerja industri bukan jawaban jitu masalah kurang listrik. Efisiensi dan kenaikan tarif selektif perlu ditimbang.

PEMERINTAH seperti kehilangan akal dalam mengatasi krisis listrik. Mulai pekan depan, industri diharuskan menjadikan Sabtu dan Minggu sebagai hari kerja. Dasar keputusan bersama lima menteri itu sederhana. Pada setiap hari kerja, wilayah Jawa-Bali mengalami defisit 600 megawatt. Sebaliknya, pada hari libur, Sabtu dan Minggu, terjadi surplus listrik. Ini bukan solusi yang menyentuh inti persoalan.

Inti soalnya, tarif listrik di Indonesia di bawah ongkos produksi. Akibatnya, PT Perusahaan Listrik Negara selalu mengalami defisit, yang tahun ini diperkirakan lebih dari Rp 70 triliun. Tekor itu ditambal dengan anggaran subsidi pemerintah dan kas PLN sendiri. Beban subsidi listrik itu semakin besar karena harga minyak dan batu bara—bahan bakar penggerak pembangkit listrik—juga menanjak terus.

Dua hal yang membelit PLN itulah yang perlu serius dipikirkan jalan keluarnya, ketimbang mencari solusi parsial dengan memindahkan hari kerja. Kerepotan akan terjadi. Buruh bakal menuntut uang lembur. Transportasi, perbankan, pelabuhan, bea-cukai, serta infrastruktur lain belum tentu mendukung kerja di hari libur itu. Jika tidak siap benar, kebijakan baru ini malah memunculkan biaya tambahan.

Solusi sementara yang bisa ditempuh adalah memaksimalkan pasokan. Sebab, saat ini kapasitas listrik terpasang masih sekitar 3.000 megawatt di atas konsumsi pada beban puncak. Tapi, karena ada perbaikan pada beberapa pembangkit dan suplai gas tak lancar, pasokan menjadi kurang. Perbaikan perlu dilakukan segera untuk meningkatkan suplai. Solusi ini akan sangat berarti sembari menunggu proyek pembangkit listrik tenaga batu bara sepuluh ribu megawatt selesai dibangun pada 2011.

Pemerintah tak boleh berhenti sampai proyek sepuluh ribu megawatt itu selesai. Konsumsi listrik lima tahun

mendatang pasti juga meningkat. Maka investasi di sektor listrik merupakan keharusan. Tak bisa lain, kesulitan besar PLN selama sepuluh tahun terakhir ini perlu dibereskan: keuangan pabrik setrum itu mesti dibuat sehat.

Selain melakukan efisiensi, PLN harus mengatur permintaan listrik. Pengaturan untuk membatasi konsumsi, misalnya, bisa dilakukan dengan menaikkan tarif secara selektif. Sejak awal tahun ini, banyak perusahaan mematikan gensetnya dan kembali menjadi pelanggan PLN karena harga minyak melonjak. Dengan genset, biaya produksi listrik bisa mencapai Rp 3.450 per kilowatt-jam, jauh di atas biaya produksi PLN yang Rp 1.300. Harga jual listrik PLN hanya Rp 630. Jelas saja pabrik tak mau memakai genset. Tarif industri perlu dinaikkan.

Konsumsi pelanggan "rumahan" juga perlu diatur. Pembatasan tarif subsidi perlu diberlakukan. Disarankan tarif subsidi hanya diberikan kepada pelanggan kelas di bawah 2.200 kilovolt-ampere. Konsumen di atas kelas itu diperkirakan lebih banyak memakai listrik untuk menambah kenyamanan hidup ketimbang memenuhi kebutuhan pokok.

Bila semua program ini dijalankan, rapor pabrik setrum negara itu diprediksi bisa kembali biru, seperti sebelum krisis ekonomi 1997. Investasi untuk menambah pasokan pun bisa kembali dijalankan.

Menaikkan tarif listrik secara selektif merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh. Pemerintah mestinya berani mengambil tindakan tak populer ini. Lagi pula, warga kelas bawah tak akan memprotes karena tak terkena kenaikan. Sebaliknya, konsumen kelas atas dengan kekuatan ekonominya pasti sanggup menanggung tambahan tagihan. Konsumen sudah terlalu lama dimanjakan dengan listrik murah. Ini saatnya berbagi beban agar krisis listrik segera berlalu.



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3

HALAMAN : 150

TAHUN 200

Tak Ada Perencanaan untuk Mem-back-up Pertumbuhan

SETELAH rakyat di pedalaman, sekarang giliran para pengusaha yang berdebar-debar lantaran harus mengalami pemadaman listrik berkala. Listrik yang byar-pet, sebentar nyala, sebentar padam, jelas membuat mereka cemas. Proses produksi yang sudah direncanakan matang bisa berantakan.

Apalagi pemadaman yang dilakukan Perusahaan Listrik Negara di lapangan ternyata sering tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan. Dijadwalkan padam, eh, ternyata listrik tetap menyala. Sebaliknya, dijadwalkan hidup, tiba-tiba listrik mati.

Beban pengusaha kian bertambah lantaran terbitnya surat keputusan bersama lima menteri yang mengharuskan mereka menggeser hari kerja ke Sabtu-Minggu. Perusahaan Listrik Negara diberi wewenang menjatuhkan sanksi jika dunia usaha tak mematuhi ketentuan ini.

Sebagai "kepala suku" para pengusaha, Mohamad Suleman Hidayat ketuban pulung ikut memikirkan persoalan kelangkaan setrum ini. Dalam posisi sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, ia telah beberapa kali mengundang Perusahaan Listrik Negara untuk mendiskusikan masalah listrik. Jumat pekan lalu, kepada Grace S. Gandhi dan fotografer Gerry Andria dari *Tempo* ia membagi pendapatnya tentang persoalan ini. Berikut ini petikannya.

Apa tanggapan Anda atas rencana Perusahaan Listrik Negara menaikkan tarif listrik saat beban puncak?

Kami masih melakukan kajian. Ada kawasan industri, kebanyakan ter-

membicarakan kenaikan tarif, tapi mereka minta jaminan tidak ada lagi pemadaman. Di sisi lain, buat industri-industri menengah ke bawah, kenaikan tarif menjadi beban berat.

Pengusaha besar tidak yakin, dengan kenaikan tarif, tak ada lagi pemadaman?

Iya. Mereka belum yakin kenaikan tarif bisa menjamin listrik tidak lagi padam. Soalnya, PLN sekarang ada minus, tekor Rp 26 triliun (tambahan subsidi listrik akibat kenaikan harga minyak). PLN minta sebagian besar, kalau bisa seluruh kekurangan Rp 26 triliun itu, dibebankan ke industri. Nah, kami hitung-hitung, untuk menambal Rp 26 triliun itu, kenaikan tarifnya 80 persen untuk golongan I-3, I-4, dan B-3. Itu tidak mungkin. Terlalu tinggi.

Sebaliknya, apa alasan pengusaha kelas menengah-bawah menolak kenaikan tarif listrik?

Mereka menganggap kenaikan tarif itu tidak *fair*. Tapi, setelah berbicara dengan PLN, kami jadi mengetahui apa kesulitan PLN. Jadi kami secara moderat mau mencari *problem solving*, menjajaki *problem* masing-masing. Kami juga memberi tahu beban pengusaha, kan ada beban resmi dan beban tidak resmi di industri. PLN juga harus tahu itu.

Mengapa mereka menganggap kenaikan tarif tidak *fair*?

Bukan cuma PLN yang ingin ditanggunjangi *negative cash flow*-nya. PLN tidak melihat *cash flow* pengusaha juga berat.

Apa tanggapan Anda atas terbitnya surat keputusan bersama lima menteri untuk menggeser hari kerja ke Sabtu-Minggu?

Sebelum keputusan itu dibuat, saya

bahwa pergeseran itu hanya sementara. Memang dalam situasi darurat, usul itu kami terima dengan catatan: pertama, sifatnya harus sementara, hanya beberapa bulan. Kedua, pergeseran hari kerja ke Sabtu-Minggu harus diatur dengan petunjuk pelaksanaan. Menteri Tenaga Kerja seharusnya membuat surat edaran atau keputusan menteri yang mengatur soal pergeseran hari kerja itu. Tapi pemerintah tidak bersedia melakukannya.

Apakah pemerintah takut dituntut?

(Tersenyum, tidak menjawab pertanyaan itu.) Kementerian Tenaga Kerja hanya menyelenggarakan rapat tripartit dan hasilnya pengusaha bisa menerima. Tapi penyelesaian dengan buruh atau pekerja akan diselesaikan melalui serikat-serikat pekerja. Mudah-mudahan buruh bisa mengerti, karena ini keadaan darurat. Tapi Anda tahu sendiri, ada sekitar 90 unit atau organisasi pekerja. Sering kali kalau ada masalah-masalah begini, sadar atau tidak sadar, mereka suka mempolitisasi. Bukan *problem solving*. Jadi saya minta juga kesadaran mereka. Tapi sepanjang sifatnya sementara, mungkin pengusaha dan pekerja bisa menerima.

Mengapa dalam surat keputusan bersama tidak disebutkan sampai kapan pergeseran hari kerja itu dilakukan?

Tidak tahu. Tidak mungkin pergeseran Sabtu-Minggu itu dilakukan sampai Desember 2009, saat proyek 10 ribu megawatt dimulai. Maka kita sepakat sifatnya hanya sementara. Kalau pemerintah mengatakan sampai akhir Desember, pasti akan kena protes. Jadi soal ini diibandingkan. Saya mengambil inisiatif, yuk cari jalan lain yang lebih realistis.

Apa kesulitan pengusaha dalam melakukan pergeseran hari kerja?

Memang ada masalah-masalah teknis. Pergeseran Sabtu-Minggu itu akan menggeser kebiasaan pekerja bertemu dengan keluarga. Bagi kaum Nasrani yang beribadah Sabtu atau Minggu bagaimana? Apakah diberi



Karyawan PT Danliris Sukoharjo merawat mesin pemintal saat listrik pabrik dipadamkan.

perkecualian atau tidak boleh ke gereja atau harus tetap bekerja? Ini juga harus diperhatikan. Kan tidak mungkin kalau harus tetap bekerja? Ini hal yang sangat sensitif dan memerlukan kebijakan khusus. Mudah-mudahan bisa segera diatasi agar tidak menimbulkan protes.

Bagaimana pula kaitannya dengan mitra kerja pengusaha di luar negeri?

Ada beberapa sektor produksi yang karena hari kerja digeser dan harus tetap memenuhi kontrak order dengan buyers, pengiriman barang dilakukan Sabtu-Minggu. Saya sudah minta ke Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), bisa tidak pemerintah konsekuen? Bisa tidak Kantor Bea dan Cukai di pelabuhan buka, petugas Bea dan Cukai masuk Sabtu-Minggu? Bu Ani menjawab, kalau Bea dan Cukai buka, apa perbankan juga bisa buka? Ya, saya bilang lagi, itu harus dibicarakan dengan Bank Indonesia.

Anda melihat pergeseran waktu kerja ini bermasalah....

Ada rentetan yang mungkin harus dilihat satu per satu. Mungkin belum terpikirkan ketika Wakil Presiden mengeluarkan ide ini. Dunia usaha setuju sepanjang sifatnya sementara. Sambil itu berjalan, saya dan teman-teman ingin melihat lebih realistis apa, sih, masalah PLN? Kenyataannya kan sekarang sudah begini? Kami mau menggugat kayak apa, tidak akan terpecahkan problemnya. Jadi kami bilang ke PLN, "Oke, sekarang kami mau tahu angka-angka dan bebanmu." Dalam rapat-rapat, sudah keluar semua angka-angka itu. Tinggal men-

cari solusinya.

Apakah semua industri bersedia melakukan pergeseran waktu kerja?

Ada industri yang bekerja 24 jam, tujuh hari seminggu, 365 hari per tahun. Saya kira jenis industri seperti ini tidak boleh tersentuh karena industri jenis ini tidak bisa dibuat libur. Kayak *cold storage*, kalau industri ini diberhentikan, habis semua produknya. Usaha ini harus kena listrik terus. Ini sudah disetujui pemerintah. Ada sektor-sektor yang dikecualikan dari surat keputusan itu.

Para pengusaha menerima surat keputusan bersama itu langsung berlaku 14 Juli?

Kalangan dunia usaha, sih, maunya paling cepat akhir Agustus, karena banyak masalah yang mesti diselesaikan. Jadi pengusaha belum sepakat.

Bagaimana Kadin melihat masalah yang dihadapi PLN?

Ada beberapa hal pokok yang dihadapi sekarang. Tidak ada suplai listrik untuk penyambungan baru, baik pelanggan lama maupun pelanggan baru. Padahal pelanggan lama membutuhkan penambahan daya untuk ekspansi, sedangkan sambungan baru sekarang ini sudah ditolak.

Industri apa saja yang ditolak melakukan sambungan baru?

Terutama usaha-usaha yang mengkonsumsi listrik besar. Bukan hanya di industri, melainkan juga di sektor bisnis besar, seperti perkantoran, hotel, dan mal. Pelanggan lama juga tak bisa menambah daya baru.

Seberapa besar kerugian dunia usaha akibat pemadaman listrik?

Byar-pet ini sangat merugikan. Kalau mau *positive thinking*, sih, ini karena konsumsi meningkat akibat ekonomi tumbuh. Permukiman-permukiman baru bermunculan, kawasan industri makin berkembang. Pertumbuhan itu memang dipacu oleh pemerintah. *Economic growth* terus ditingkatkan di atas enam persen. Tapi ini tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang untuk mem-back-up pertumbuhan.

Investor asal Jepang di Indonesia terangterangan mengeluhkan pemadaman listrik, ya....

Sekitar 400 investasi Jepang di Indonesia mencatat ada lebih dari 110 pemadaman selama setahun terakhir. Sebagian besar tanpa pemberitahuan dan tidak ada jadwal pemadaman yang jelas, sehingga sangat mengganggu proses produksi dan merugikan mereka secara komersial. Kadin Jepang, yang diwakili Jakarta Japan Club, menyurati Duta Besar Jepang di Indonesia. Duta Besar kemudian menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditembuskan juga ke Kadin. Mereka minta penjelasan bagaimana menanggulangnya.

Benarkah di lapangan jadwal pemadaman bergilir itu sering tidak tepat?

Buat dunia usaha, jadwal pemadaman itu harus ditaati supaya bisa menyesuaikan proses produksi. Tapi sering kali terjadi, jadwalnya tidak tepat. Yang dijadwalkan mati tetap nyala, yang tidak dijadwalkan tiba-tiba mati. Buat sektor industri dan dunia usaha, itu sangat merugikan.

Ada jadwal tapi ngawur....

Iya... (tertawa). Itu yang membuat kita sangat terpukul. Ketika dijadwalkan akan mati, kan proses produksi disesuaikan, eh, tetap nyala. Atau dijadwalkan nyala, ketika sedang proses, tiba-tiba mati.

Menurut Anda, kebijakan energi kita amburadul?

Mungkin demikian. Saya sudah mengusulkan ke Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara agar perusahaan-perusahaan negara yang produksinya sangat terkait dengan kepentingan dunia usaha, sektor riil, membuat *action plan* sendiri sehingga bisa mengikuti tingkat pertumbuhan. Perencanaan itu minimal per lima tahun. Dulu kita punya Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) sehingga bisa kelihatan. Kadin pernah mengeluarkan *road map* industri pada 2004 dan sudah diserahkan ke pemerintah. Itu dibikin 100 asosiasi dalam dan luar negeri. Ambil saja itu, tinggal diperbarui.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 **27** 28 29 30 3

HALAMAN : 10

TAHUN 200

Tempo Interaktif: Online News From Indonesia
Address http://www.tempointeraktif.com

Tolak Ganti Hari Libur

MULAI 28 Juli, industri di Indonesia harus mulai menggeser hari libur dari Sabtu dan Minggu ke hari lain, minimal dua kali dalam sebulan. Menurut pemerintah, kebijakan ini untuk mengatasi krisis listrik. Pada setiap hari kerja, Senin-Jumat, selalu terjadi defisit pasokan arus hingga 600 megawatt. Sementara itu, pada hari libur, setrum yang *nganggur* bisa mencapai 2.000 megawatt. Diharapkan, setelah perubahan ini, tak perlu ada lagi pemadaman listrik bergilir.

Pemerintah mengatakan kebijakan ini hanya berlaku sementara, sampai pasokan listrik kembali normal. Apa kata responden jajak pendapat *Tempo Interaktif* soal ini? Dalam jajak pendapat periode 9-16 Juli 2008, mayoritas responden tal setuju dengan kebijakan tersebut.

KOMENTAR

Krisis listrik kan tanggung jawab pemerintah. Jangan mengorbankan masyarakat yang sedang susah karena naiknya harga minyak.
Bambang Sunarso, Jakarta

Keadaan darurat listrik perlu dicarikan solusinya. Salah satunya mengalihkan sebagian jam kerja industri ke hari libur. Namun pemerintah juga harus menghukum pejabat PLN yang tidak cakap mengelola perusahaan.
Galumbang C. Sitinjak, Jakarta

Untuk kebaikan bersama, kita perlu bertoleransi terhadap pemerintah dan pengusaha agar negara ini tetap berkibar.
Adnan, Banten

Indikator Pekan Depan

SEJUMLAH perwira tinggi militer yang diduga berperan dalam kerusuhan di Timor Timur pada 1999 lolos dari jerat hukum. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta bersepakat tidak membawa kasus pelanggaran hak asasi manusia sebelum dan sesudah jajak pendapat itu ke pengadilan. "Keadilan harus melihat ke depan sehingga dapat digunakan untuk membangun persahabatan kedua negara," ujar Horta ketika bersama Yudhoyono menerima laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste di Nusa Dua, Bali, pertengahan bulan ini.

Apakah Anda mendukung kesepakatan RI-Timor Leste untuk tidak menuntut pertanggungjawaban hukum para terduga pelaku pelanggaran hak asasi di Timor Timur? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.

Setujukah Anda atas rencana pemindahan sebagian jam kerja industri ke hari libur?

Jawab	Persentase	Jumlah
Ya	25,48%	80
Tidak	69,75%	219
Tak Tahu	4,78%	15
Total	100%	314

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3

HALAMAN : 26

TAHUN 200

TAK ADA PLN, GENSET PUN JADI



PEDAGANG GENSET.
 PENJUALANNYA
 MENINGKAT 30%

TRUST/SUTIKNO

Dian P. Saraswati dan Wisnu Arto Subari

ADA kabar gembira dari PLN. Pabrik steam ini akhirnya urung melakukan pemadaman bergilir di Jakarta dalam seminggu terakhir. Tadinya, rencana itu akan diberlakukan mulai 11-25 Juli 2008—akibat jadwal pemeliharaan pipa gas yang biasa memasok gas dari BP West Java ke PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok.

Fahmi Mochtar, Direktur Utama PLN, menjelaskan, pemadaman dibatalkan karena beban PLN berkurang—setelah warga banyak melakukan penghematan. "Kalau minggu depan masih seperti sekarang, tidak akan ada pemadaman," katanya.

Penghematan listrik memang sudah menjadi program PLN sejak beberapa waktu lalu. PLN bahkan sudah meluncurkan paket insentif bagi pelanggan yang bisa melakukan penghematan hingga di bawah 80% pemakaian rata-rata per unit rumah tangga secara nasional.

Pemakaian rata-rata nasional untuk pelanggan kelas R1-450VA sebesar 75 kWh per bulan. Lalu, untuk pelanggan R1-900VA sebesar 115 kWh, R1-1.300VA sebesar 201 kWh per bulan, dan R1-2.200VA sebesar 358 kWh per bulan. Pelanggan R2 sebesar 650 kWh dan pelanggan R3 sebesar 1.767 kWh. Nah, bila pelanggan bisa menghemat, mereka akan diberikan

insentif berupa pengurangan tagihan rekening. Bila tidak, yang dikenakan justru tarif progresif yang lebih mahal.

Sepertinya, pola penghematan ini belum sepenuhnya berhasil. Sebab, PLN mengakui masih kekurangan pasokan listrik sebanyak 600 megawatt setiap harinya. Alhasil, pemadaman bergilir mungkin masih akan terjadi di kemudian hari.

Kalau sudah begitu, sumber energi lain terpaksa menjadi alternatif. Tak ayal, mesin generator alias genset pun laris manis. Agen-agen pembangkit listrik mandiri ini mulai bermunculan dan menyita banyak halaman iklan di koran.

Salah satunya adalah PT Emily Megawatt Natalima. Perusahaan ini mengklaim sanggup memasok listrik sekaligus membangun jaringan dan pemasangan panel listrik untuk keperluan mal sekalipun. Untuk detail harga dan seberapa stabil suplai listriknya, Lily, staf pemasaran Emily, mengaku tidak punya kapasitas untuk bicara. Sedangkan pimpinan Emily enggan diwawancarai.

Toko-toko penjual genset di Pasar Glodok, Jakarta, juga mengalami peningkatan penjualan sampai 30%. Di Surabaya, penjualan genset mengalami lonjakan hingga 60%. Bahkan pedagang genset di Surabaya mengaku kewalahan dengan permintaan yang tinggi dalam sebulan terakhir. Permintaan genset tak hanya datang dari Surabaya, melainkan juga dari Jombang, Nganjuk, Kediri, Madiun, Probolinggo, dan Pasuruan.

Kondisi serupa juga terjadi di luar Jawa. Di Padang, Sumatra Barat, rata-rata penjualan genset meningkat 500% hingga 600% per hari. Peningkatan juga terjadi di Riau dan beberapa kota di luar Pulau Jawa.

Meningkatnya permintaan genset ini tentunya sangat memprihatinkan. Menurut Fridson Parlindungan Tinambunan, Project Manager Divisi Kelistrikan EMI, naiknya permintaan genset bertolak belakang dengan keinginan pemerintah menghemat energi. Bisa dipastikan, akan terjadi penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang mengalir ke industri. "Pemerintah bakal kesulitan untuk mengawasinya," ujar dia.

Dampak negatif lainnya, akan terjadi polusi udara besar-besaran. Maklum, genset menghasilkan asap ketika dipakai. Tapi, bagaimana lagi? Daripada gelap? □

Akibat pasokan listrik yang *byar pet* itu, PLN pun terpaksa sering melakukan pemadaman bergilir. Setelah itu, pemerintah mencoba ikut turun tangan. Tapi, langkahnya aneh. Pemerintah malah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) lima menteri yang akan diberlakukan mulai 21 Juli nanti.

Dalam SKB ini, industri diharuskan mengalihkan waktu libur kerja selama, maksimal, dua hari dalam satu bulan. Penjadwalan pergeseran hari libur menjadi hari kerja itu akan diatur oleh pemerintah daerah bersama PLN. Keputusan yang rumit dan, terus terang, sulit dilaksanakan.

PLN juga tidak tinggal diam. BUMN ini lantas berniat menaikkan tarif listrik industri. Selama ini ada dua model yang diterapkan PLN untuk tarif industri. Ada tarif *prima* yang listriknya langsung dikirim gardu induk tanpa gangguan sebesar Rp 1.500 per kWh. Sedangkan satunya lagi tarif yang dihitung dalam jam dan besarnya hampir Rp 500 per kWh. "Padahal, biaya produksi listrik sekarang sudah Rp 1.300 per kWh," ujar Fahmi Mochtar, Direktur Utama PLN.

Lantas, akan seberapa besar kenaikan tarif listrik untuk PLN ini? "Itu yang akan kami bahas dengan Kadin," ujar Fahmi.

Taufik Haji, Deputi Direktur Niaga Jawa-Bali PLN, mengatakan, kenaikan tarif untuk industri masih dalam tahap diskusi. "Intinya memang ke sana (menaikkan tarif)," ujar Ahmad.

Ia menambahkan, PLN menginginkan semua *cost recovery* dibayar oleh pengusaha. Namun, ujar Ahmad, pengusaha memilih menaikkan tarif berkisar angka 10%-50%. "Angka itu datangnya dari Kadin," katanya.

Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin, mengakui bahwa angka 10%-50% berasal dari Kadin. Namun, itu masih sebatas wacana. "Sebenarnya Kadin menolak kenaikan tarif listrik," ujar Bambang. Sebab, tarif listrik PLN saat ini lebih mahal bila dibanding di negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Sebelum ada kenaikan, Kadin mengajukan syarat agar PLN diaudit. Supaya semua jelas. Saat ini, PLN mengklaim bahwa biaya produksi PLN mencapai Rp 1.300 per kWh. "Itu apa dasarnya?" kata Bambang.

KADIN DAN APINDO BEDA SUARA

Bambang lalu mengingatkan, PLN selalu beralasan biaya produksi naik lantaran harga batu bara naik. Padahal pemasok ba-

ini dijual lagi kepada PLN—dan diterima. "Jadi memang permainannya seperti itu. Seperti ada mafianya," tuding Bambang. Nah, permainan seperti itulah yang diharapkan bisa terungkap lewat audit itu tadi.

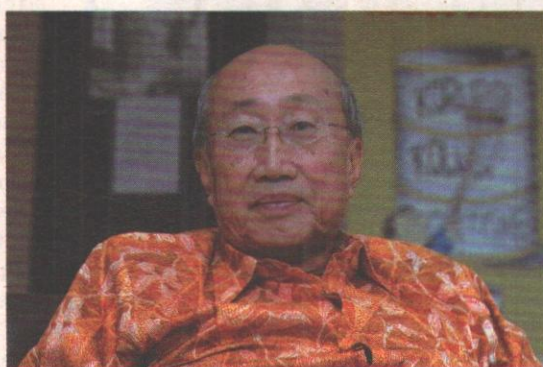
Bambang memang kencang mengkritik PLN. Tapi, ia cukup kooperatif dengan rencana kenaikan tarif. Ini berbeda dengan sikap kalangan pengusaha lainnya. Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), misalnya, masih menolak rencana itu. Sofjan Wanandi, Ketua Apindo, tegas-tegas menolak kenaikan tarif listrik industri. "Tidak ada pembicaraan mengenai hal itu (kenaikan tarif listrik) antara pengusaha dan PLN. Kami cuma diajak berbicara mengenai pemakaian listrik pada waktu beban puncak dan di luar beban puncak," ucap Sofjan.

Sofjan melanjutkan, kenaikan tarif listrik bukan merupakan pilihan yang ingin ia setuju. Alasannya, kenaikan tarif listrik industri bisa meningkatkan jumlah pengangguran, karena industri bisa melakukan efisiensi besar-besaran. Sebaliknya, dia menuntut pemerintah untuk memeriksa PLN dan memperbaiki manajemen di PLN. "PLN harus diperiksa mengapa bisa membeli harga BBM dan batu bara dengan harga mahal," kata dia.

DOK. TRUST/CATUR EKONO



AGUS TJAHAJANA WIRAKUSUMAH



SOFJAN WANANDI



FAHMI MOCHTAR

FOTO-FOTO: TRUST/SUTIKNO

Yang pasti, rencana PLN untuk menaikkan tarif listrik sudah memperoleh lampu hijau dari DPR. "Boleh-boleh saja PLN menaikkan tarif listrik industri. Toh, antara PLN dengan Kadin pasti akan ada pembicaraan untuk mencapai kesepakatan," tutur Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana. Menurut Sutan, DPR tak akan ikut campur soal tarif listrik industri. Tapi, kalau yang naik adalah tarif dasar listrik (TDL), maka akan menjadi urusan DPR.

Nah, akhir pekan lalu, pembahasan PLN dan Kadin sudah dimulai. Ahmad

ru bara PLN masih dibayar dengan harga lama, Rp 800 ribu per ton. Maklum, itu sesuai kontrak lama yang bersifat jangka panjang dan batu bara yang dipakai PLN juga bukan batu bara kelas satu yang berkalori tinggi.

Tak hanya itu, ujar Bambang, banyak pemasok batu bara yang dikecewakan PLN. Barang yang sudah dikirim ke PLTU, diklaim tidak bagus oleh PLN. Daripada batu bara dibawa pulang, pemasok pun menjualnya kepada makelar di sekitar PLTU. Nah, oleh para makelar, batu bara

Agus Tjahajana Wirakusumah, Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian, lalu menyarankan agar PLN lebih rajin dalam mendekati kalangan pengusaha. Soalnya, ada banyak kelompok dalam pengusaha. Menurut Agus, ada kelompok pengusaha yang sanggup menanggung beban kenaikan tarif listrik industri dan ada pula yang tidak. "Pokoknya, walaupun kenaikan tarif ini bersifat *business to business*, PLN tetap harus bicara dengan sebanyak-banyaknya asosiasi," ujar Agus.

Sebuah gagasan yang bijak. □

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

KELISTRIKAN

5.600 Pengusaha DIY Acuhkan SKB 5 Menteri

YOGYAKARTA (MI): Sekitar 5.600 pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak tertarik mengalihkan waktu kerja ke Sabtu dan Minggu.

Kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) lima menteri tentang pengoptimalan beban listrik melalui pengalihan waktu kerja pada sektor industri Jawa-Bali dinilai memberatkan pengusaha dan pekerja.

Ketua Umum Kadin DIY Sukamto mengatakan apabila SKB itu dilaksanakan, akan berdampak pada meningkatnya beban operasional pengusaha. Akibatnya, harga jual produk naik dan bisa tidak terbeli oleh masyarakat. Hal itu membuat pengusaha merugi.

"Pengusaha sudah terkena tiga kali imbas kebijakan pemerintah yang sangat memberatkan. Pertama, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Kedua, kenaikan tarif dasar listrik, dan ketiga adalah peraturan untuk menggeser jam kerja ke Sabtu dan Minggu."

Sukamto mengatakan penggeseran hari kerja tersebut akan sulit

dilaksanakan.

Sebelumnya, Manajer PT PLN Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Yogyakarta M Fadholi mengatakan pengusaha mau tidak mau harus melaksanakan kebijakan tersebut. Di DIY sendiri, ditargetkan ada pengurangan beban hingga 11,6 Mw per hari.

"Di DIY, beban listrik yang ditanggung sebesar 197 Mw pada siang hari dan 280 Mw pada malam hari," katanya.

Agar beban listrik bisa berkurang, pihaknya memiliki tanggung jawab, di antaranya menyosialisasikan hemat listrik dan mengatur jatah penghematan agar dampaknya seminimal mungkin. Selain itu, memberikan informasi pengurangan beban pada pelanggan seefektif mungkin dan memberikan kompensasi pemotongan bea beban sesuai dengan ketentuan.

"Mau tidak mau pengusaha tetap harus melaksanakan pengalihan waktu kerja. Kalau menjalankan pengalihan waktu kerja ke Sabtu dan Minggu, tidak akan ada pemadaman listrik. Jika tidak melaksanakan, PLN akan memadamkan listrik sewaktu-waktu."

(SO/SY/EM/N-1)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 :29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Hemat Listrik

SITUS resmi PLN www.plnjaya.co.id memberikan beberapa tips untuk menghemat energi, mulai dari rumah.

- ▶ Padamkan lampu jika penerangan sudah tak diperlukan lagi.
- ▶ Gunakan lampu-lampu taman pada tempat dan waktu yang sangat diperlukan saja. Jangan lupa mematikannya sewaktu hari mulai terang.
- ▶ Jangan biarkan TV atau radio terus hidup ketika acara telah usai atau sewaktu Anda tidak lagi berminat menonton atau mendengarkannya.
- ▶ Hal-hal yang perlu diperhatikan bila ingin memasukkan makanan atau minuman ke kulkas:
 - Hindari memasukkan makanan atau air yang masih panas langsung ke kulkas.
 - Biarkan makanan itu menjadi dingin dulu di luar, baru masukan ke dalam kulkas atau freezer.
 - Tutup rapat kulkas Anda. Sebab, kebocoran lewat celah pintu kulkas akan menyebabkan motor berputar dengan tenaga lebih besar.
 - Jangan mengisi kulkas terlalu berlebihan. Akibatnya kompresor harus bekerja lebih keras untuk menjaga suhu udara.
- ▶ Matikan AC ketika ruangan tak lagi dipakai, gunakanlah termostat pada kedudukan suhu sesuai dengan kebutuhan.
- ▶ Gunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitasnya.
- ▶ Gunakan setrika listrik seefisien mungkin.
- ▶ Gunakan lampu hemat energi. (M-1)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Meneg BUMN: Kondisinya Tidak Pas Penerbitan Obligasi PLN Rp 10 Triliun Ditentang

Di tengah kesulitan pasokan listrik, PLN berencana menerbitkan obligasi internasional (global bond) senilai Rp10 triliun pada tahun 2008.

DIRUT PLN Fahmi Mochtar mengatakan, obligasi tersebut akan digunakan memenuhi kebutuhan internal perseroan. "Sebanyak lima penjamin emisi obligasi tersebut tengah menjalani tender terbatas," katanya. Dia menambahkan, obligasi yang akan masuk rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2009 itu masih menunggu izin Kementerian Negara BUMN.

Mengenai obligasi rupiah senilai Rp3 triliun, Fahmi mengatakan, penerbitan obligasi yang diperuntukkan mendanai proyek 10.000 MW masih dalam proses. PLN, lanjutnya, juga tengah menjajaki pinjaman valuta asing (valas) senilai 1,8-2 miliar dolar AS dari beberapa bank asing antara Bank of China, BNP Paribas, dan China Exim Bank.

Wakil Dirut PLN Rudiantara menambahkan, total kebutuhan pinjaman valas mencapai 4,4 miliar dolar AS dan rupiah senilai Rp 17,5 triliun. Dari kebutuhan valas 4,4 miliar dolar AS tersebut, sekitar 1,2 miliar dolar AS sudah ditandatangani dan satu miliar dolar AS sianya dalam tahap fi-

Menanggapi hal ini, Menteri Negara BUMN (Meneg BU) Sofyan Djalil meminta mengkaji ulang rencana penerbitan global bond. "Saya pikir di sekarang tidak bagus, karena memikirkan cara yang menguntungkan daripada menerbitkan bond dengan risiko tinggi," jelas bekas anak Meneg BUMN Tanri Abernethy. Sofyan justru memberikan alternatif kepada PLN untuk menerbitkan obligasi internasional (IPO) asetnya. Pelepasan obligasi, kata dia jauh lebih menguntungkan. Namun kementerian BUMN tetap terbuka dengan rencana penerbitan tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan, PLN menerima proposal penerbitan global bond senilai Rp10 triliun dari PLN. Belum ada opsi untuk mencari sumber dana untuk investasi PLN, dia, masih terbuka.

Sementara itu, beberapa pengusaha meminta PLN lebih berkonsentrasi pemenuhan pasokan listrik kalangan industri. Mereka khawatir tarif dinaikkan asalkan PLN jamin tidak ada lagi pem-

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Syarat Jika SKB Jilid II Mau Nongol

Pemerintah Dulu Dong Berhemat!

Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri, baik jilid I dan II tetap tak efektif menyelesaikan masalah krisis energi di Indonesia. Pemerintah malah diminta berhemat terlebih dahulu.

HAL ini ditegaskan ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. SKB Lima Menteri Jilid I tentang pengalihan jam kerja dan SKB Jilid II tentang penghematan energi di sektor bisnis, seperti pusat perbelanjaan atau mal, perhotelan, perkantoran swasta, hingga papan reklame dikatakannya tidak efektif dalam upaya penghematan listrik.

"Itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah energi dan listrik. Pemerintah harus memulai penghematan dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Bukan dengan menekan produksi industri otomotif dan elektronik, mengeluarkan SKB, mengurangi jam kerja dan lain-lain," ujar Faisal dalam diskusi *Krisis Energi Di Depan Mata: Mencari Solusi Menghadapi Krisis Energi di Kampus UI, Depok, kemarin*.

Yang dimaksud Faisal penghematan harus dilakukan pemerintah terlebih dahulu dimulai dengan penghematan listrik di instansi-instansi pemerintah. Pemerintah juga wajib mengefektifkan jam kerja pegawai negeri, menyelesaikan kerja dengan tepat waktu dan lembur hanya jika sangat terpaksa.

"Pemerintah jangan membuat rakyat yang sudah menderita menjadi lebih menderita dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan SKB-SKB yang tidak berguna. Apakah pemerintah tidak tahu segala macam implementasi kebijakan-kebijakan dan SKB-SKB itu berdampak buruk bagi buruh? Memaksa buruh untuk bekerja di hari Sabtu-Minggu jelas melanggar aturan, apalagi jika sampai tidak mendapatkan uang lembur!" tandas Faisal.

Ia berpendapat, kaum kecil yang sudah menderita jangan ditambah lagi penderitaannya. Sebaliknya yang memiliki kenikmatan lebih, kenikmatannya itulah yang harus diturunkan.

"Buruh jelas sudah menderita, jangan diganggu lagi. Pemerintah sebaiknya melakukan penghematan di sektor bisnis yang sifatnya hanya sekedar hura-hura saja seperti diskotek, *night club* dan bioskop," tandas Faisal.

Ia malah melihat dengan dibirikannya kesempatan pada Pemda dan swasta mengelola listrik di daerah justru mampu mengatasi krisis listrik yang terjadi belakangan ini. "Misalnya di Kalimantan dibangun pembangkit listrik baru untuk dialiri sampai ke Jawa," usulnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Pelaksana Energy Epicentrum, Aziz Muslim. Ia berpendapat, jika sejak dulu serius dalam menangani masalah energi, pemerintah tidak akan panik ke-

tika harga minyak mentah dunia naik dan menjadikannya sebagai dasar menaikkan harga BBM, listrik dan mengeluarkan SKB Lima Menteri.

Pemerintah dikatakannya, harusnya memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil melakukan penghematan listrik agar menjadi teladan daerah lain yang belum melakukan penghematan listrik.

"Kalau hal ini dilakukan pasti banyak daerah yang berlomba-lomba melakukan penghematan, jadi membantu pemerintah juga bukan dalam menangani masalah krisis energi ini," tandas Aziz.

Sebelumnya, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM J Purwono mengatakan, esensi program penghematan yang tertuang dalam SKB Jilid II berguna meningkatkan kapasitas cadangan listrik di sistem Jawa-Bali. "Jadi, opsinya mengurangi pemakaian atau mengoperasikan gensetnya sendiri," ujar Purwono, Jumat (25/7).

SKB Jilid II yang rencananya bakal diteken Menteri ESDM dan Menteri Perdagangan ini diharapkan dapat menurunkan pemakaian listrik 10-20 persen.

Dengan penghematan tersebut, akan terjadi pengurangan beban puncak sekitar 200-300 MW di sistem kelistrikan Jawa-Bali sehingga, kapasitas cadangan bertambah. Dampaknya, jika ada pembangkit listrik yang mati atau dalam perawatan, maka masih ada cukup cadangan untuk menutupi kekurangan pasokan akibat matinya pembangkit tersebut.

Yang menarik, kata Purwono, dalam perjalanan pembahasan SKB dua menteri tersebut, kini muncul gagasan baru, yakni opsi untuk tidak menggunakan SKB Dua Menteri, tapi hanya menggunakan Surat Edaran PLN.

"Instrumen ini masih digodog. Yang jelas, esensinya tetap, yaitu mengajak pelanggan bisnis untuk mengurangi konsumsi listrik PLN saat beban puncak pada pukul lima sore hingga sepuluh malam (17.00 - 22.00, red)," katanya.

General Manager (GM) PT PLN Disjaya Purnomo Willy menambahkan, salah satu upaya penghematan yang akan dilakukan PLN Disjaya adalah dengan membatasi penerangan untuk papan reklame iklan. Jika pihak pengiklan tidak segera mengurangi penerangannya hingga setengah dari konsum-

si listrik saat ini, maka PLN Disjaya akan melakukan pembatasan secara paksa. "Billboard iklan ini kan lampunya luar biasa terangnya. Karena itu, kita minta

dikurangi," terangnya.

Caranya, lanjut Willy, bisa dilakukan dengan memasang alat pengatur waktu atau *timer*, sehingga penerangan untuk

periklanan akan mati secara otomatis pada pukul 24.00. Saat ini, penerangan papan reklame menyala mulai pukul 18.00-06.00 pagi. ■ CR-6/JPNN

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Depperin Berasumsi Investor Asing Masih Tak Surut

Jakarta, Probisnis RM.

Menteri Perindustrian (Menteri) Fahmi Idris kembali membantah jika ada investor-investor asing yang menunda realisasi investasinya ke Indonesia akibat krisis listrik yang belakangan terjadi.

Menurutnya, pernyataan itu cenderung mengada-ada karena realisasi investasi asing hingga saat ini tidak pernah surut.

"Pernyataan itu saya anggap bohong besar, itu sangat mengada-ada. Tidak ada seperti itu (penundaan realisasi investasi, red)," ujar Fahmi di Gedung Departemen Perindustrian, Jakarta.

Dia mengatakan, adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri tentang pengalihan jam kerja untuk mengurangi konsumsi listrik pada hari kerja tidak ada kaitannya dengan investor yang menunda investasinya masuk ke Indonesia.

Fahmi mereview adanya pemberitaan besar-besaran di sejumlah media yang mengatakan akibat pemadaman listrik yang sering terjadi 40 pengusaha Jepang akan hengkang dari Indonesia. Hal itu dinilainya tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali.

"Entah dari kalangan pemerintah maupun pengusaha besar sekarang ini kok mudah sekali me-

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Jan - Mei 2007 Rp18,62 triliun	Jan - Mei 2008 Rp5,91 triliun	Persentase 68,3 persen
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Penanaman Modal Asing (PMA)

Jan - Mei 2007 USD 3,7 miliar	Jan - Mei 2008 USD 9,78 miliar	Persentase 164,1 persen
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Sumber : BKPM

ngeluarkan pernyataan pribadi," cetusnya.

Sayangnya, menurut Fahmi, pernyataan-pernyataan itu dikeluarkan tanpa melakukan pendalaman maupun meneliti lebih lanjut kondisi yang terjadi sebenarnya. Mereka hanya menilai berdasarkan perkiraan-perkiraan, bukan berdasar kenyataan di lapangan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai penurunan minat investasi di tahun 2008 akan berlanjut hingga Pemilu 2009.

Menurutnya, turunnya realisasi investasi maupun minat berinvestasi bisa menyebabkan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi. "Kondisi seperti ini juga akan

membuat penyerapan tenaga kerja menjadi berkurang," tambahnya.

Sofjan mengatakan, pemerintah harus mempunyai rencana jangka pendek yang bisa jadi jalan untuk membantu pengusaha.

Dia menilai, penurunan minat untuk merealisasikan investasi adalah sebuah realita yang nyata. Untuk itu, ancaman melambatnya pertumbuhan ekonomi harus disikapi dengan cepat oleh pemerintah. "Pemerintah tidak hanya asal ngomong atau membuat kebijakan yang macam-macam," lanjutnya.

Investasi yang tertunda itu, lanjut dia, terutama berada di sektor manufaktur (industri pengolahan). Sementara investasi di sektor perkebunan dan pertambangan akan tetap berlangsung me-

nyusul proyeksi peningkatan kebutuhan sejumlah komoditi strategis di pasar dunia.

Namun ia meminta pemerintah tetap fokus mengusahakan investasi labour intensif (penyerapan tenaga kerja tinggi). "Kalau pertambangan atau kelapa sawit itu pasti jalan terus," jelasnya.

Di tempat terpisah, pemerintah menolak desakan sejumlah pihak untuk melonggarkan daftar negatif (negatif list) investasi untuk mendongkrak peringkat Indonesia di daftar negara pro-investasi versi Organisation Economic Cooperation and Development (OECD).

Karena itu, pemerintah tidak kecewa meski Indonesia menempati posisi ketujuh dari negara yang paling menghambat investasi karena menjaga kepentingan nasionalnya. Indonesia masih lebih baik dibandingkan India, Cina, Rusia, Islandia, Meksiko dan Australia. Namun, Indonesia dinilai lebih buruk dibandingkan dengan Afrika Selatan, Kanada, dan Brazil.

"Pemerintah tidak terlalu kecewa, karena kita harus tetap menjaga kepentingan nasional. Kita punya *negatif list* investasi yang tidak akan kita perlonggar bila menyangkut kepentingan na-

sional," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta Kamis (25/7).

Kalla menuturkan, setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus tetap dijaga karena sensitif bagi kelangsungan hidup bangsa. Karena itu, pemerintah membuat pagar sehingga tidak semua orang bisa masuk ke sektor-sektor strategis yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

"Kalau sektor strategis itu diberikan pada investor asing, semua orang akan marah. Jangan kita, Cina dan India juga tidak semua sektor bisa dimasuki sepenuhnya, karena setiap negara pasti mengutamakan kepentingan nasional," tegasnya.

Pemerintah, kata Kalla, akan lebih fokus pada peringkat *doing bussiness* versi Bank Dunia melalui pembenahan infrastruktur, perbaikan sistem birokrasi, dan reformasi sistem perpajakan. Saat ini, Indonesia sudah berada di posisi 75 dari 130-an negara, atau turun 10 poin dari peringkat tahun lalu.

"Saya yakin dalam tiga tahun mendatang, kita akan lebih baik dari Cina dan India, bila subsidi BBM kita sudah jauh lebih kecil," tegasnya. ■ FIK

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 39

TAHUN 2008

Langkah Basi Hemat

Sektor ritel dan bisnis diminta lagi untuk berhemat listrik

Energi

Lagi-lagi, sektor bisnis dan ritel kudu berhemat. Mereka harus bergiliran menyalakan genset sebulan sekali. Sudah begitu, mereka wajib menyetel temperatur alat pendingin pada suhu 25 derajat Celsius. Cuma, ini termasuk langkah usang.

Ali Imron Hamid

Kalau ada yang kebingungan caranya menghemat listrik, pastilah Perusahaan Listrik Negara (PLN). Lihat saja, buntut dari usaha pejabat setrum negara itu untuk menghemat listrik adalah mengetok surat keputusan bersama (SKB) 5 menteri.

Padahal, jauh sebelum aturan main ini diteken, sejumlah pusat perbelanjaan, hotel maupun perkantoran sudah lebih dulu berupaya menghemat energi. Caranya, menggunakan lampu hemat energi dan menaikkan temperatur alat pendingin ruangan alias AC.

Toh, upaya ini belum bisa menambal kekurangan pasokan listrik. Itu sebabnya, PLN menggandeng Departemen Perdagangan (Depdag) duduk bersama dan

membikin surat keputusan di luar SKB 5 menteri itu. Mereka juga merangkul tiga asosiasi besar, yaitu Asosiasi Pengelola Pusat Belanja (APPBI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan Asosiasi Pengusaha Real Estate.

PLN, Depdag, dan tiga asosiasi ini sudah berunding bersama setidaknya enam kali dalam sebulan terakhir. Tujuannya jelas, merumuskan draf aturan. "Aturan ini juga akan berlaku untuk Jawa-Bali," kata Direktur PLN Jawa, Madura, Bali Murtaqi Syamsuddin.

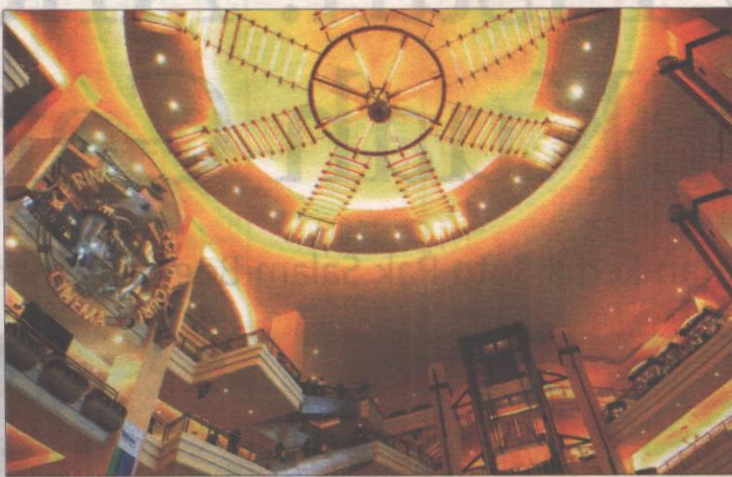
Dari enam kali pertemuan itu, PLN, Depdag, dan asosiasi menghasilkan tiga macam rumusan yang sebetulnya sudah usang. Rumusan itu dibikin dengan mempertimbangkan keinginan pelaku bisnis agar tetap beroperasi.

Pertama, pengelola pusat perbelanjaan diminta mengurangi penggunaan AC, dengan cara menurunkan suhu dari 22° Celsius menjadi 25° Celsius.

Kedua, mal, hotel, maupun perkantoran diminta menyalakan genset secara bergiliran setidaknya sebulan sekali.

Ketiga, mengurangi jam operasional pusat perbelanjaan yang semula pukul 09.00 hingga 22.00 menjadi pukul 11.00 hingga 21.00.

PLN juga berencana memonitor pengguna listrik yang paling tinggi



KONTAN/Daniel Prabowo

dan memberi pengarahannya supaya yang bersangkutan lebih hemat listrik saat beban puncak.

Menurut hitungan PLN, cara tersebut bisa menghemat penggunaan daya listrik saat beban puncak sebesar 20%. Angka itu setara dengan sumbangan pasokan listrik sebesar 600 MW.

Pengusaha tak setuju

Hanya saja, Ketua Harian Ap-rindo Tutum Rahanta bilang, tidak semua sektor ritel seperti mal mau menerima aturan ini. Apalagi sampai menyalakan AC dengan

suhu 25° Celsius sepanjang hari. Pasalnya, ini bisa mengurangi kenyamanan pengunjung dan efeknya bisa menurunkan omzet penyewa (*tenant*) di mal.

Bisa jadi aturan itu cocok diberlakukan di daerah bersuhu dingin seperti Bandung. "Tapi kalau di daerah yang panas, bisa menimbulkan masalah," ujar Tutum.

Belum lagi soal kebijakan pengurangan waktu operasional. Asal tahu saja, selama ini kontrak antara pengusaha dengan pihak merek mewajibkan jam penjualan barang antara pukul 10.00-22.00. Jika ini diubah, maka akan meng-

ubah kebiasaan belanja konsumen pula. Tahu sendiri, selama ini jam paling produktif untuk belanja di kota besar adalah di malam hari. Kalau jam operasional mal berubah, bakal ada perubahan atau bahkan akan mengurangi minat belanja. "Ini akan membuat wisata belanja kita gagal," kata Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) A. Stefanus Ridwan S.

Jika pengusaha harus menyalakan genset agar malnya bisa tetap beroperasi seperti sebelumnya, yakni satu jam lebih lama dari ketentuan baru, mereka harus memikul biaya yang cukup berat. Menurut kalkulasi Ridwan, selama sebulan, pengusaha akan memikul tambahan biaya pembangkit listrik milik sendiri sekitar Rp 1 miliar per unit.

Singkatnya, kata Ridwan, aturan ini akan mengurangi omzet dan terganggunya pasokan dari pabrik. Padahal, hampir 80% produk yang dilego di pusat perbelanjaan adalah produk lokal.

Toh, pemerintah masih anging-anginan menjalankan aturan baru ini. Malah bisa dibilang, realisasinya masih jauh. Soal kapan SK itu keluar pun, yang berwenang cuma bilang, "Kami masih membahasnya," tandas Ardiansyah Parman, Sekjen Depdag. □